



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 22 Januari 2026

Nomor : 050/I/ 040067 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindaklanjuti Atas Rekomendasi
LHE AKIP Tahun 2025

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di
Palembang

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor 700/435/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 17 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, bersama ini disampaikan tindaklanjuti (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAPORAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	HASIL EVALUASI		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
[1]	[2]		[3]	[4]
I	Perencanaan Kinerja			
	a.	Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja	Pada tanggal 06 Januari 2026, telah diadakan rapat mengenai refleksi pencapaian kinerja tahun 2025 serta orientasi target kinerja tahun 2026
	b.	Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		Pada tanggal 12 Januari 2026 telah diadakan rapat penetapan rencana target kinerja per masing-masing UPTB
II	Pengukuran Kinerja			
	a.	Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Dokumen pengukuran kinerja tidak hanya di dasarkan dari pengukuran atas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga di dasarkan dari pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja	Dokumen LKjIP Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran atas realisasi capaian kinerja per indikator kinerja
	b.	Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan		Mekanisme dan prosedural pengumpulan data kinerja tergambar pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja
	c.	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan		Data kinerja yang dikumpulkan bersumber pada data Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

	d.	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Pengukuran hasil capaian kinerja masing-masing pegawai agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Hasil capaian kinerja masing-masing pegawai telah menjadi dasar acuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
	e.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) organisasi	Pengukuran kinerja agar mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi	Untuk saat ini pengukuran kinerja belum dijadikan acuan dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi, namun penjenjangan kinerja (<i>cascading</i>) telah diturunkan ke unit kerja yang lebih rendah sampai ke level staf pelaksana
	f.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah	Rencana aksi telah dijabarkan dalam aksi dan langkah kerja yang bersifat operasional untuk menunjang kinerja
III	Pelaporan Kinerja			
	a.	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
	b.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan	Jadwalkan pembahasan laporan kinerja sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana kerja masing-masing indikator kinerja	Pembahasan laporan kinerja telah diagendakan setiap triwulan tahun berkenaan
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	a.	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja		Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP akan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

Tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

I. Perencanaan Kinerja

- a. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- b. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Tindaklanjut:

- a. Pada tanggal 06 Januari 2026, telah diadakan rapat mengenai refleksi pencapaian kinerja tahun 2025 serta orientasi target kinerja tahun 2026









Rapat pada tanggal 06 Januari 2026 merupakan rapat refleksi atas kinerja tahun 2025 serta orientasi kinerja tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kinerja Tahun 2025

NO.	JENIS PAJAK	CAPAIAN KINERJA TA. 2025			RENCANA KERJA TA. 2026	BERTAMBAH/BERKURANG
		TARGET	REALISASI	%		
1.	PKB	771.441.317.847,00	778.888.270.431,00	100,97	875.047.134.917,00	103.605.817.070,00
2.	BBN - KB	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14	835.433.859.206,00	37.630.775.836,00
3.	PBB - KB	1.473.535.793.624,00	1.719.840.624.162,49	116,72	1.546.164.899.355,00	72.629.105.731,00
4.	PAP	26.540.973.333,00	45.139.844.782,29	170,08	34.317.897.336,00	7.776.924.003,00
5.	PAJAK ALAT BERAT	6.000.000.000,00	3.874.594.593,00	64,58	6.301.200.000,00	301.200.000,00
6.	PAJAK ROKOK	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82	744.775.210.439,00	14.603.435.501,00
7.	OPSEN MBLB	27.874.543.495,00	16.506.805.333,05	59,22	29.273.845.578,00	1.399.302.083,00
JUMLAH		3.833.367.486.607,00	3.927.846.336.223,83	102,46	4.071.314.046.831,00	237.946.560.224,00

Kinerja pendapatan sektor pajak daerah tahun 2025:

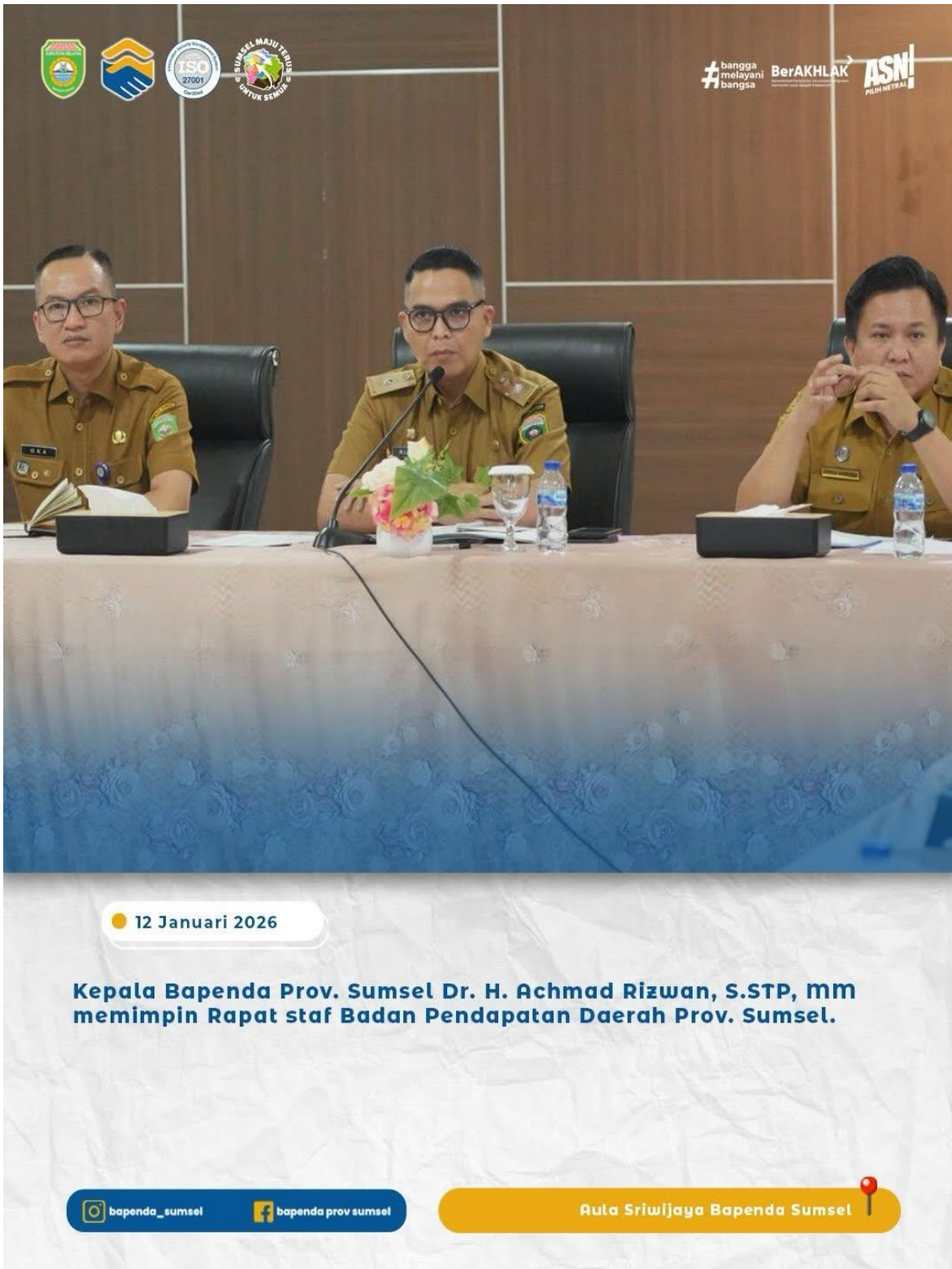
- I. Pendapatan sektor pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 3.927.846.336.223,83 atau 102,46 % dari rencana target sebesar Rp. 3.833.367.486.607,00, sektor pajak daerah mengalami surplus sebesar Rp. 94.478.849.616,80.
- II. Kinerja pendapatan dari sektor pajak daerah ini turut berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah dari sisi pajak daerah dimana rasio kapasitas fiskal daerah pada tahun 2024 sebesar 1,894 dan posisi Desember 2025 rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 2,052 atau mengalami kenaikan sebesar 0,158 point.
- III. Keberhasilan ini disebabkan karena strategi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi untuk peningkatan penerimaan pajak daerah dari PKB dan BBN-KB yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan bersama 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang langsung dipimpin oleh Bupati/Walikota se Sumatera Selatan;
 - c. Sinergi dan Kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan razia bersama, pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta bimbingan teknis bagi para ketua Rukun Tetangga;
 - d. Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) melalui satuan tugas bersama stakeholder terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal serta 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan *door to door service* untuk penagihan pembayaran pajak daerah.

2. Orientasi kinerja Tahun 2026:

- I. Rencana target pendapatan sektor pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp. 4.071.314.046.831,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 237.946.560.224,00 atau kenaikan sebesar 6,057 %
- II. Dengan kenaikan rencana target sektor pajak daerah tahun 2026 sebesar 6,057 % dan penyesuaian terhadap transfer ke daerah yang turun, maka strategi untuk penguatan kapasitas fiskal daerah tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Rencana kerjasama dengan akademisi Universitas untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan;
- c. Rencana kerjasama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan survei pendataan
- d. Sinergi dan Kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan razia bersama, pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta bimbingan teknis bagi para ketua Rukun Tetangga dan atau para Kepala Desa;
- e. Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- f. Rencana pelaksanaan *door to door service*, optimalisasi pendapatan sektor pajak bahan bakar dan operasi gabungan dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
- g. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi pajak daerah;
- h. Penguatan basis data pajak daerah;
- i. Pengawasan berbasis risiko serta penguatan pengendalian sistem intern pemerintah sektor pajak daerah;
- j. Penguatan kepada setiap unit kerja dan pegawai untuk memahami dan meningkatkan kinerja.

- b. Pada tanggal 12 Januari 2026 telah diadakan rapat penetapan rencana target kinerja per masing-masing UPTB







Rapat pada tanggal 12 Januari 2026 dilaksanakan untuk Para Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dengan tujuan:

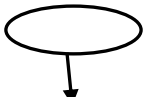
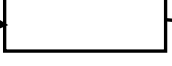
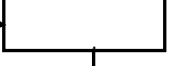
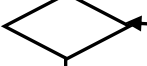
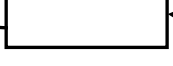
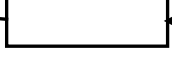
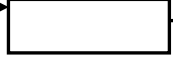
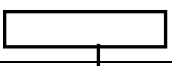
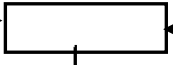
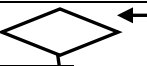
1. Mengevaluasi atas kinerja seluruh UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah (PKB, BBN-KB, PAP, PAB, PBB-KB) tahun 2025;
2. Agar masing-masing UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan memahami dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target penerimaan pajak daerah (PKB, BBN-KB, PAP, PAB, PBB-KB);
3. Membangun sinergitas dan kolaborasi bersama antara UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
4. Penguatan kepada setiap unit kerja dan pegawai untuk memahami dan meningkatkan kinerja;
5. Melakukan update basis data pajak di masing-masing daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

Pengukuran Kinerja

- a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- c. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- d. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
- e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) organisasi
- f. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja

Tindaklanjut:

- a. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah ada (terlampir).
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana				Kualitas Mutu Baku		
		Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV	Staff	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)
1.	Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah					• RPJMD/Renstra • Cascading down	1 hari	• Penetapan IKU
2.	Mengidentifikasi dan menetapkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon II					• Permenpan 53/2014	1 hari	• Dokumen Perjanjian Kinerja
3.	Mengidentifikasi dan menganalisa penjenjangan kinerja (<i>cascade down</i>) Unit Kerja Eselon III s.d level operasional staff	Tidak				• RPJMD/Renstra • IKU	1 hari	• Cascading down
4.	Mengidentifikasi dan menganalisa Risiko Strategis (RSO) dan Risiko Operasional (ROO) Perangkat Daerah					• PP 60/2008 • Permendagri 99/2018 • Pergub 74/2016	1 hari	• Dokumen Peta Risiko
5.	Pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis	Ya				• Dokumen RKA • Dokumen DPA	1 hari	• Dokumen RTP
6.	Pelaksanaan dan pemantauan pengukuran kinerja					• Dokumen anggaran	Per TW	• Dokumen Pelaksanaan
7.	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja	Tidak				• RTP	1 hari	• Dokumen monev
8.	Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja					• RTP	1 hari	• Dokumen Pengelolaan Risiko
9.	Pelaporan Kinerja					• Hasil Tindak Lanjut	1 hari	• Dokumen pelaporan

Data PDRB dari Website BPS

Beranda > Produk - Tabel Statistik > Neraca Ekonomi > Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Statistik Ekonomi
 - Statistik Makroekonomi
 - Neraca Ekonomi**
 - Statistik Bisnis
 - Statistik sektoral
 - Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
 - Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
 - Harga-Harga
 - Biaya Tenaga Kerja
 - Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi
 - Pertanian, Kehutanan, Perikanan
 - Energi
 - Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
 - Transportasi
 - Pariwisata
 - Perbankan, Asuransi dan Finansial
- Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2025

Terakhir Diperbarui : 12 November 2025

[← Kembali](#)
[Unduh](#)
[JSON](#)
[Bagikan](#)

2025 [Cari data statistik](#)

☐ Freeze judul kolom

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	24.318,36	25.153,08	27.596,41	-	-
B. Pertambangan dan Penggalian	39.835,64	43.757,09	44.986,50	-	-
C. Industri Pengolahan	31.673,46	32.764,54	33.009,20	-	-
D. Pengadaan Listrik dan Gas	227,38	231,04	242,38	-	-
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	160,64	163,30	166,96	-	-
F. Konstruksi	18.338,66	19.402,11	19.570,86	-	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.301,99	25.546,26	26.175,88	-	-
H. Transportasi dan Pergudangan	4.278,21	4.545,73	4.465,03	-	-
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	3.428,08	3.773,56	3.835,07	-	-
J. Informasi dan Komunikasi	5.244,83	5.221,25	5.251,07	-	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.646,31	3.698,97	3.867,74	-	-
L. Real Estate	5.115,54	5.427,53	5.518,45	-	-
M,N. Jasa Perusahaan	191,51	199,86	204,51	-	-
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.164,30	4.646,41	4.225,27	-	-
P. Jasa Pendidikan	3.627,21	3.598,53	3.819,90	-	-
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.055,99	1.102,79	1.106,13	-	-
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.200,33	1.225,24	1.254,82	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	170.808,45	180.457,30	185.296,20	-	-
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	155.153,40	165.275,28	170.322,97	-	-

Tabel Terkait

- Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
- Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku 2010
- Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten Anwar Sastro No 1694 Palembang;
Sumatera Selatan 30129
Telp (0711) 351665; 318456; Email :
bps1600@bps.go.id.

Tentang Kami

Profil BPS
PPID
Kebijakan
Diseminasi

Tautan Lainnya

ASEAN Stats
Forum Masyarakat Statistik
Reformasi Birokrasi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Politeknik Statistika STIS
Pusdiklat BPS
JDIH BPS

Government Public Relation

19 Januari 2026, 10:14 WIB
BNPB Akselerasi Pembangunan Hutan di Lima Kecamatan Aceh Utara

19 Januari 2026, 10:13 WIB
Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat dan Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Sumatra pada 15

Sumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Manual S&K Daftar Tautan

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Data Pajak Daerah dari Website DJPK

Filter data APBD

Periode

Tahun

Wilayah

Sub-wilayah

SUBMIT

POSTUR APBD

Se-Prov. Sumsel

Tahun 2025

Jumlah data APBD yang diterima SIKD 18 pemda

Keterangan: Data APBD Murni/Perubahan, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	47.505,71 M	40.404,20 M	85.05
PAD	10.033,34 M	8.313,73 M	82.86
Pajak Daerah	7.077,05 M	5.967,95 M	84.33
Retribusi Daerah	641,52 M	508,74 M	79.30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	418,12 M	338,18 M	80.88
Lain-Lain PAD yang Sah	1.896,65 M	1.498,87 M	79.03
TKDD	34.591,91 M	29.595,64 M	85.56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	34.591,91 M	29.595,64 M	85.56
Pendapatan Lainnya	2.880,47 M	2.494,82 M	86.61
Pendapatan Hibah	5,26 M	4,05 M	77.10
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	153,55 M	116,40 M	75.81
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.721,66 M	2.374,36 M	87.24
Belanja Daerah	48.815,76 M	36.267,65 M	74.29
Belanja Pegawai	17.515,84 M	14.149,97 M	80.78
Belanja Pegawai	17.515,84 M	14.149,97 M	80.78
Belanja Barang dan Jasa	12.974,82 M	9.123,08 M	70.31
Belanja Barang dan Jasa	12.974,82 M	9.123,08 M	70.31
Belanja Modal	8.749,67 M	5.959,50 M	68.11
Belanja Modal	8.749,67 M	5.959,50 M	68.11
Belanja Lainnya	9.575,44 M	7.035,09 M	73.47
Belanja Bagi Hasil	1.790,13 M	1.884,70 M	105.28
Belanja Bantuan Keuangan	6.103,79 M	4.258,39 M	69.77
Belanja Bunga	19,88 M	17,39 M	87.50
Belanja Subsidi	32,49 M	17,47 M	53.78
Belanja Hibah	1.281,24 M	773,84 M	60.40
Belanja Bantuan Sosial	121,54 M	79,30 M	65.25
Belanja Tidak Terduga	226,37 M	3,99 M	1.76
Pembiayaan Daerah	1.310,04 M	2.421,99 M	184.88
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.468,01 M	2.541,34 M	173.11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.468,01 M	2.541,31 M	173.11
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,03 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	157,97 M	119,35 M	75.55
Penyertaan Modal Daerah	77,99 M	41,99 M	53.84
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	79,99 M	77,36 M	96.72

Komitmen, inovasi, dan layanan terbaik wujud integritas kami

Data LRA BPKAD

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

Rekening				Uraian	Jumlah					Realisasi 2024
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	Selisih	%		
4				PENDAPATAN DAERAH	11,129,125,002,891.00	6,543,538,055,895.93	(4,585,586,946,995.07)	58.80	10,965,288,224,934.90	
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,838,287,154,591.00	3,201,572,841,453.93	(1,636,714,313,137.07)	66.17	5,312,548,123,255.90	
4	1	01		Pendapatan Pajak Daerah	3,833,367,486,607.00	2,717,717,884,312.13	(1,115,649,602,294.87)	70.90	4,744,701,180,376.87	
4	1	02		Pendapatan Retribusi Daerah	5,110,991,800.00	3,901,809,877.00	(1,209,181,923.00)	76.34	8,225,836,940.00	
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	173,213,785,434.00	106,316,886,488.21	(66,896,898,945.79)	61.38	138,824,929,544.35	
4	1	04		Lain-Lain PAD yang Sah	826,594,890,750.00	373,636,260,776.59	(452,958,629,973.41)	45.20	420,796,176,394.68	
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	6,286,774,924,300.00	3,339,256,598,442.00	(2,947,518,325,858.00)	53.12	5,642,095,592,679.00	
				Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6,280,285,631,300.00	3,332,767,305,442.00	(2,947,518,325,858.00)	53.07	5,642,095,592,679.00	
4	2	01	07	Dana Bagi Hasil	3,329,910,847,300.00	1,522,728,990,900.00	(1,807,180,656,400.00)	45.73	2,645,802,349,840.00	
4	2	01	08	Dana Alokasi Umum	1,765,321,372,000.00	1,262,251,710,974.00	(503,069,661,026.00)	71.50	1,806,673,215,634.00	
4	2	01	09	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0.00	17,518,026,902.00	17,518,026,902.00	0.00	236,102,516,086.00	
4	2	01	07	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	1,185,053,612,000.00	530,267,576,666.00	(654,786,035,334.00)	44.75	953,517,511,119.00	
				Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6,489,293,000.00	6,489,293,000.00	0.00	100.00	0.00	
				Transfer Pemerintah Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625,541,000.00	
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4,062,924,000.00	2,708,616,000.00	(1,354,308,000.00)	66.67	4,018,968,000.00	
4	3	01		Hibah	4,062,924,000.00	2,708,616,000.00	(1,354,308,000.00)	66.67	4,018,968,000.00	
5				BELANJA DAERAH	11,237,619,654,098.00	4,946,597,757,646.96	(6,291,021,896,451.04)	44.02	10,908,424,497,431.90	
5	1			OPERASI	5,670,896,331,854.00	2,947,642,425,461.77	(2,923,253,906,392.23)	50.21	5,308,864,484,748.94	
5	1	01		Pegawai	3,039,234,426,438.00	1,630,593,390,704.00	(1,408,641,035,734.00)	53.65	2,529,375,704,900.00	
5	1	02		Barang dan Jasa	2,427,851,528,526.00	1,092,369,274,218.77	(1,335,482,254,307.23)	44.99	2,205,615,578,219.94	
5	1	04		Subsidi	1,300,000,000.00	0.00	(1,300,000,000.00)	0.00	2,786,684,555.00	
5	1	05		Hibah	402,510,376,890.00	224,679,760,539.00	(177,830,616,351.00)	55.82	561,105,467,074.00	
5	1	06		Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981,050,000.00	
5	2			MODAL	1,563,959,208,052.00	455,707,701,904.30	(1,108,251,506,147.70)	29.14	1,303,072,011,451.71	
5	2	01		Tanah	3,819,000,000.00	909,775,000.00	(2,909,225,000.00)	23.82	701,091,453.00	
5	2	02		Peralatan dan Mesin	352,590,047,746.00	144,445,710,796.00	(208,144,336,950.00)	40.97	272,576,659,179.00	
5	2	03		Gedung dan Bangunan	279,336,525,609.00	70,415,412,199.30	(208,921,113,409.70)	25.21	260,181,034,813.71	
5	2	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	848,422,192,332.00	194,337,495,119.00	(654,084,697,213.00)	22.91	699,678,969,706.00	
5	2	05		Aset Tetap lainnya	73,731,188,000.00	44,445,423,490.00	(29,285,764,510.00)	60.28	66,149,063,496.00	
5	2	06		Aset Lainnya	6,060,254,365.00	1,153,885,300.00	(4,906,369,065.00)	19.04	3,785,192,804.00	
5	3			TIDAK TERDUGA	29,144,517,180.00	3,743,250.00	(29,140,773,930.00)	0.01	82,301,295.00	
5	3	01		Tidak Terduga	29,144,517,180.00	3,743,250.00	(29,140,773,930.00)	0.01	82,301,295.00	
5	4			TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL	3,773,619,597,012.00	1,543,243,887,030.89	(2,230,375,709,981.11)	40.90	4,296,405,699,936.25	
5	4	01		Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1,698,080,940,377.00	1,284,994,652,752.00	(413,086,287,625.00)	75.67	2,399,428,901,098.00	
5	4	03		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2,017,538,656,635.00	258,249,234,278.89	(1,759,289,422,356.11)	12.80	1,896,976,798,838.25	
5	4	04		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	58,000,000,000.00	0.00	(58,000,000,000.00)	0.00	0.00	
				SURPLUS/DEFISIT	(108,494,651,207.00)	1,596,940,298,248.97	1,705,434,949,455.97	14.78	56,863,727,503.00	

Rekening				Uraian	Jumlah				Realisasi 2024
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
6				PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36			
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36	0.36	100.00	51,630,923,704.36
6	1	01		Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36	0.36	100.00	154,808,628,910.91
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	04		Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	05		Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	06		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	07		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	08		Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	09		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	10		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177,705,206.55
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	02		Penyerahan Modal/Investasi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	03		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	04		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	05		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	06		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177,705,206.55
6	2	07		Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	08		Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	09		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)					0.00	1,705,434,949,456.33	1,705,434,949,456.33	-	108,494,651,207.36
RASIO KEMANDIRIAN						49%			

Di Update Tgl. 30-09-25 Pkl. 08.00 WIB

KETERANGAN :	
Saldo Kas RKUD	: 968,952,639,320.75
Saldo Kas BLUD	: 77,309,118,320.17
Saldo Kas Bendahara/BOS	: 659,173,191,815.41
	1,705,434,949,456.33

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV SUMSEL,
MEWAKILI,


FETRI ASWANTI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000032003

- d. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
- Hasil capaian kinerja masing-masing pegawai telah menjadi dasar acuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN POM IX KAMPUS - PALEMBANG - KODE 30137
TELEPON (0711) 310633, 353107 FAX (0711) 319819

DAFTAR TANDA TERIMA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : Badan Pendapatan Daerah		Bulan : Mei											
Unit Kerja : UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah EMPAT LAWANG		Tahun : 2025											
NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 %	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 %	TPP LAIN-LAI	JUMLAH	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00		-Pajak Persen -Pajak Nilai -Pajak Gaji -Pajak yg di Bayar	TANDA TANGAN Besaran TPP DITERIMA
						-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 % -Setelah Pot.		-PKP Gaji -Pagu BPJS Gaji -PPH Gaji -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jmi Pot BPJS		
1		IV/a	III/b	Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang	8.338.000	3.335.200	5.002.800	298.800	8.846.170	7.374.758	209.370	6,00	
						-	-	209.370		6.765.728	52.342	973.255	
						3.335.200	5.002.800		8.846.170	5.234.272	261.712	899.507	7.684.951
2		III/d	IV/a	Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pada UPTB Wil. Empat lawang	6.300.000	2.520.000	3.780.000	133.700	6.685.700	4.747.508	252.000	3,50	
						-	-	252.000		4.459.100	63.000	400.162	
						2.520.000	3.780.000		6.685.700	6.300.000	315.000	400.162	5.978.538
3		IV/a	IV/a	Kasubbag Tata Usaha pada UPTB Pengelolaan Penda Wil. Empat Lawang	5.070.000	2.028.000	3.042.000	149.400	5.422.200	6.378.243	202.800	3,00	
						-	-	202.800		5.811.702	50.700	354.013	
						2.028.000	3.042.000		5.422.200	5.070.000	253.500	338.067	4.830.633
4		III/d	IV/a	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan pada UPTB PPD Wil Empat Lawang	5.070.000	2.028.000	3.042.000	267.400	5.540.200	5.682.876	202.800	2,00	
						1,50	10,00	202.800		5.148.450	50.700	217.769	
						30.420	304.200		5.205.580	5.070.000	253.500	217.769	4.734.311
						1.997.580	2.737.800						
5		III/d	-	Penyusun Laporan Keuangan pada UPTB Pengelolaan Penda Wil. Empat Lawang	4.471.000	1.788.400	2.682.600	267.400	4.917.240	5.166.189	178.840	1,50	
						1,00	-	178.840		4.652.774	44.710	150.983	
						17.884	-		4.899.356	4.471.000	223.550	150.983	4.524.823
						1.770.516	2.682.600						
6		III/d	-	Pengelola Data Dokumen Perpajakan pada UPTB PPD wilayah Empat Lawang	3.885.000	1.554.000	2.331.000	267.400	4.307.800	5.465.944	155.400	1,50	
						0,50	-	155.400		4.938.686	38.850	146.489	
						7.770	-		4.300.030	3.885.000	194.250	146.489	3.959.291
						1.546.230	2.331.000						

aSumsei, Hal : 1

DAFTAR TANDA TERIMA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : Badan Pendapatan Daerah		Bulan : Juli												
Unit Kerja : UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah MUBA		Tahun : 2025												
NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 %	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 %	TPP LAIN-LAI	JUMLAH	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00		-Pajak Persen -Pajak Nilai -Pajak Gaji -Pajak yg di Bayar	TANDA TANGAN Besaran TPP DITERIMA	
						-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 % -Setelah Pot.		-Besaran TPP -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-PKP Gaji -Pagu BPJS Gaji -PPH Gaji -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jmi Pot BPJS		
7		III/d	-	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi pada UPTB PPD Wil. MUBA I	3.885.000	1.554.000	2.331.000	133.700 155.400	4.174.100	4.378.308 4.104.100	155.400 38.850	1,75 149.661		
						1.554.000	2.331.000		4.174.100	3.885.000	194.250	149.661		3.830.183
8		III/c	-	Pengelola Barang Milik Negara Pd Subbag Tu UPTB PPD Wil.MUBA I Bapenda Prov.Sumsel	3.885.000	1.554.000	2.331.000	267.400 155.400	4.307.800	5.414.193 4.889.324	155.400 38.850	2,00 194.435		
										13.535		13.535		180.904
9		III/c	-	Pengelola Keuangan pada sub Bag.TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil.MUBA I Bapenda Prov Sumsel	3.885.000	1.554.000	2.331.000	133.700 155.400	4.174.100	4.596.100 4.311.600	155.400 38.850	1,75 153.478		
						1.554.000	2.331.000		4.174.100	3.885.000	194.250	153.478		3.826.372
10		III/d	-	Pengadministrasi Umum UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muba I	3.240.000	1.296.000	1.944.000	267.400 129.600	3.637.000	6.124.022 5.566.370	129.600 32.400	1,50 145.142		
						6,55 84.887			3.552.113	3.240.000	162.000	145.142		3.244.971
11		III/c	-	Pengelola data dan Informasi Perpajakan pd UPTB PPD Wil.MUBA I Bapenda Prov.Sumsel	3.240.000	1.296.000	1.944.000	267.400 129.600	3.637.000	5.895.021 5.347.946	129.600 32.400	1,50 142.980		
						1.296.000	1.944.000		3.637.000	3.240.000	162.000	142.980		3.332.028
12		III/a	-	Pengadmnitrasi Pajak pada UPTB PPD Wil.MUBA I Bapenda Prov.Sumsel	3.240.000	1.296.000	1.944.000	267.400 129.600	3.637.000	4.618.787 4.130.654	129.600 32.400	1,50 119.754		
						6,00 77.760	10,00 194.400		3.364.840	3.240.000	162.000	119.754		3.083.086
TOTAL					54.509.000	21.803.600	32.705.400	2.768.200 2.063.383	59.340.583	58.774.908	2.063.383 515.845	3.248.715 82.503	53.238.096	
						162.647	194.400		357.047	51.584.612	2.579.228	3.166.212		
						21.640.953	32.511.000		58.983.536					

DAFTAR TANDA TERIMA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA													
SKPD : Badan Pendapatan Daerah										Bulan : Agustus			
Unit Kerja : UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OGAN ILIR II										Tahun : 2025			
NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 %	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 %	TPP LAIN-LAI	JUMLAH	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00		-Pajak Pnsn -Pajak Nilai	TANDA TANGAN
						-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP LI. -Tunj. BPJS PK 4.00 % -Pot. Nilai -Setelah Pot.		-Besaran TPP -PPH Gaji -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Gaji -Pajak yg di Bayar	
7		III/d	-	Pengolah Data Penagihan Pajak pada UPTB Wil Ogan Ilir II	3.885.000	1.554.000 1,55 24.086 1.529.914	2.331.000 - - 2.331.000	267.400 155.400 - 24.086	4.307.800 155.400 - 24.086	5.166.189 4.652.774 - -	155.400 38.850 - -	1,50 141.748 - -	 3.947.716
8		III/c	-	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak UPTB Pengelolaan Penda. Wil. Ogan Ilir II.	3.885.000	1.554.000 9,10 141.413 1.412.587	2.331.000 10,00 233.100 2.097.900	267.400 155.400 - 374.513	4.307.800 155.400 - -	5.465.944 4.938.696 - -	155.400 38.850 - -	1,50 140.988 - -	
9		III/b	-	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan pada UPTB PPD Wilayah Ogan Ilir II	3.885.000	1.554.000 3,60 55.943 1.498.057	2.331.000 - - 2.331.000	267.400 155.400 - 55.943	4.307.800 155.400 - -	4.838.822 4.340.528 - -	155.400 38.850 - -	1,00 90.906 - -	 3.966.701
10		III/d	IV/a	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada UPTB PPD Wilayah Ogan Ilir II	3.885.000	1.554.000 4,55 70.706 1.483.294	2.331.000 - - 2.331.000	267.400 155.400 - 70.706	4.307.800 155.400 - -	4.720.229 4.364.340 - -	155.400 38.850 - -	1,75 156.753 - -	
11		II/d	-	Pengadministrasi Umum pada UPTB Pengelolaan Penda Wil. Ogan Ilir II	3.240.000	1.296.000 9,10 117.935 1.178.065	1.944.000 10,00 194.400 1.749.600	254.000 129.600 - 312.335	3.623.600 129.600 - -	4.445.660 3.965.494 - -	129.600 32.400 - -	1,00 77.569 - -	 3.071.696
TOTAL					51.914.000	20.765.600 712.138 20.053.462	31.148.400 731.700 30.416.700	2.408.900 2.005.129 -	56.328.029 1.443.838 54.884.191	56.259.347 51.329.120 50.128.226	2.005.129 501.282 -	2.599.161 13.719 2.585.442	

- e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) organisasi
- Untuk saat ini pengukuran kinerja belum dijadikan acuan dalam penyesuaian (*refocusing*) organisasi, namun penjenjangan kinerja (*cascading*) telah diturunkan ke unit kerja yang lebih rendah sampai ke level staf pelaksana.

f. Rencana aksi telah dijabarkan dalam aksi dan langkah kerja yang bersifat operasional untuk menunjang kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2026	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)			
						I	II	III	IV						I	II	III	IV
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]				[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks	2,02	0,505	1,01	1,515	2,02	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sinergi optimalisasi pendapatan bersama dengan Pansus DPRD Prov. Sumsel	1.422.980.200	6 bulan	Seluruh Bidang	10	50	20	20
											Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	510.000.000	17 Kab/Kota	Seluruh Bidang	25	10	55	10
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda		Nilai	84,07	10	21	49	14,07	Penugasan kinerja sampai ke level staf pelaksana (<i>cascading</i>)	Evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala waktu	72.600.000	4 kali	Seluruh Bidang	15	30	45	10
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah		Indeks	0,458	0,11	0,23	0,34	0,458	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	98.500.000	17 Kab/Kota	Bidang P2PATDA	5	25	60	10
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD		%	1,28	0,32	0,64	0,96	1,28	Sinergi dan koordinasi pendapatan transfer pusat	Konsolidasi fiskal dengan pemerintah pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15	35	45	5
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		Rasio	1,252	0,31	0,62	0,93	1,252	Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.000.000.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,21	10	25	45	12,21	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	1.625.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20	40	30	10
										Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang	2.000.000.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20

										berbasis kompetensi juru sita								
										Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	589.450.500	2 kali	Bidang Pajak	25	30	25	20
7.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	1.1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	6,00	0,5	2,5	2,0	1,0	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	734.392.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15	30	45	10
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Rasio	0,98	0,2	0,4	0,5	0,06	Diversifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya tunggakan penerimaan pajak daerah	589.450.500	1 kali	Bidang Pajak	25	10	55	10
		1.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	0,12	1,1	0,3	0,2	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	100.000.000	2 kali	Bidang Pajak	10	30	50	10
9.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,73	0,61	0,5	0,5	0,12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Minimnya sarana prasarana media penyampaian diseminasi pajak daerah	2.000.000.000	4 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
10.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,81	4,53	3,28	4	3	Penetapan wajib pajak daerah	Masih terdapatnya objek wajib pajak baru yang belum ditetapkan	175.000.000	1 kali	Bidang Pajak	5	25	60	10
11.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	1.1	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,02 %	1,02	2	1	1	Penagihan pajak daerah	Masih terdapatnya pengajuan doleansi pajak daerah	589.450.500	2 kali	Bidang Pajak	15	35	45	5
12.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	1.1	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100 %	25	25	25	25	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan dalam pembukuan dan pelaporan pajak daerah	100.000.000	4 kali	Bidang Pajak	25	25	25	25
13.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	1.1	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,43	20	25	45	5,43	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya potensi retribusi yang belum digali untuk peningkatan PAD	121.266.000	2 kali	Bidang PDLL	5	15	60	20
14.	Meningkatnya Pendapatan	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan	%	89,78	10	30	40	9,78	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kerjasama pemanfaatan terhadap objek	637.400.000	1 kali	Bidang PDLL	10	60	20	10

	Retribusi Daerah		Retribusi Terhadap Target								retribusi masih belum optimal							
15.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,93	25	10	35	13,93	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pola intensifikasi belum optimal terhadap penerimaan pusat	220.000.000	4 kali	Bidang PDLL	15	15	60	10
16.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,83	10	40	20	14,83	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Belum optimalnya penerimaan hibah	210.000.000	4 kali	Bidang PDLL	20	20	45	15
17.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	1.1	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	3	3	3	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerapan pengendalian intern pemerintah	375.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20
18.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,91	10	35	35	12,91	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	50.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20
19.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	16,85	5,03	4,82	4	3	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran dalam pendapatan daerah	50.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20
20.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,74	3,74	2	4	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Masih terdapatnya pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan SOP	375.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20
21.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	82,19	15	25	25	16,19	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada kemampuan dan kapasitas daerah	1.150.000.000	1 kali	Bidang P2PATDA	5	65	20	10

22.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,81	10	20	30	23,81	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penelitian berbasis atas daya dukung daerah belum optimal	734.392.000	1 kali	Bidang P2PATDA	10	25	35	30
23.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,62	10	20	30	33,62	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Belum optimalnya penggalian sumber retribusi baru bagi daerah	121.266.000	4 kali	Bidang P2PATDA	5	35	45	10
24.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	1.1	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100,00	25	25	25	25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kebijakan yang belum diharmonisasi terkait dengan kebijakan investasi daerah	637.400.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15	15	65	5
25.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,96	20	20	30	24,96	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Masih terdapatnya jurnal koreksi atas pertanggungjawaban keuangan	300.000.000	4 kali	Sekretariat	10	40	30	20
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	%	4,92	1	2	1	1,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masih terdapatnya GAP antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara berkala	100.000.000	4 kali	Sekretariat	15	30	45	10
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja anggaran terhadap sasaran strategis belum optimal	100.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,92	5	25	30	20,92	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas ASN belum optimal	243.500.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masih minimnya pegawai yang mempunyai	387.000.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20

										kompetensi sesuai dengan kinerja ASN								
										Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan capacity building bagi pegawai terhadap peraturan terkait kinerja ASN	500.000.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Masih minimnya ASN yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan kinerja ASN	530.026.463	2 kali	Sekretariat	20	15	45	20
26.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,67	10	20	20	12,67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masih rendahnya penggunaan digitalisasi dalam SPBE	16.246.600.000	4 kali	UPTB Puslia	15	45	30	10
27.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,54	10	30	30	21,54	Meningkatnya modern channel	Belum optimalnya kerjasama layanan e commerce pada pembayaran pajak	200.000.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20
28.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	79,21	15	25	20	18,21	Pengembangan digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah	Belum optimalnya layanan berbasis digitalisasi	100.000.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20
29.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,78	5	10	15	11,78	Pemeliharaan asset tak berwujud	Masih rendahnya tingkat keamanan system informasi basis pajak daerah	600.000.000	2 kali	UPTB Puslia	15	30	30	25
30.	Meningkatnya Kecepatan Internet	1.1	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	25	25	25	25	Peningkatan akses internet pada blank spot area	Masih terdapatnya blank spot area	5.774.212.000	4 kali	UPTB Puslia	20	35	35	10
31.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	25	25	25	25	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	1.074.821.800	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10	45	35	10
32.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,62	2	3	2	1,62	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggakan dalam pembayaran pajak daerah	1.625.000.000	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20	25	45	10

33.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	2	2	3	2,60	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NJKB	1.255.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15	30	45	10
-----	---	-----	--	---	------	---	---	---	------	---	--	---------------	--------	---	----	----	----	----

II. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Tindaklanjut:

Realisasi kinerja telah dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya:

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	2015	0,34	Rendah
2.	2016	0,39	Rendah
3.	2017	1,16	Tinggi
4.	2018	1,117	Tinggi
5.	2019	0,794	Sedang
6.	2020	0,948	Tinggi
7.	2021	0,958	Tinggi
8.	2022	1,890	Sedang
9.	2023	1,832	Sedang
10.	2024	1,894	Sedang
11.	2025	2,052	Sedang

2. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	APBD Bersumber PAD [Rp]	Nilai Deviasi
1.	2017	3.031.633.624.303,15	3.165.360.996.225,00	4,22 %
2.	2018	3.528.010.712.183,45	3.449.590.628.837,00	2,27 %
3.	2019	3.494.510.853.251,24	3.436.828.903.746,55	2 %
4.	2020	3.375.100.484.841,37	3.617.058.256.621,75	7 %
5.	2021	3.866.149.015.117,47	4.747.088.053.007,00	19 %
6.	2022	4.931.014.199.344,74	5.385.438.862.341,00	8,44 %
7.	2023	4.410.571.914.182,50	4.149.362.000.000,00	6,30 %
8.	2024	5.312.794.988.178,45	4.760.692.664.094,00	11,5 %
9.	2025	4.509.197.075.145,67	4.459.311.556.974,00	1,119%

3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi TKD	Rasio	IKF Invers
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,840,563,000,000.00	0.57	0.43
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,992,557,000,412.00	0.50	0.50
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,378,798,650,801.00	0.46	0.54
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,649,216,454,338.00	0.48	0.52
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,982,866,000,798.00	0.48	0.52
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,329,728,331,330.00	0.39	0.61

7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,506,312,481,085.00	0.38	0.62
8.	2017	8,195,968,131,799.16	4,061,113,371,545.00	0.50	0.50
9.	2018	9,141,371,395,099.70	5,577,767,500,414.00	0.61	0.39
10.	2019	9,280,742,072,448.24	5,698,701,179,582.00	0.61	0.39
11.	2020	9,278,520,060,061.37	5,875,896,342,538.00	0.63	0.37
12.	2021	9,611,977,226,695.47	5,712,683,072,712.00	0.59	0.41
13.	2022	10,235,849,833,278.70	5,288,928,528,005.00	0.52	0.48
14.	2023	9,598,903,780,312.40	4,395,361,034,595.00	0.46	0.54
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,648,721,133,679.00	0.52	0.48
16.	2025	9.837.929.951.702,67	5.324.669.952.557,00	0,522	0.478

4. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	PERTUMBUHAN PENDAPATAN
1.	2010	3,222,589,000,000.00	
2.	2011	3,963,984,966,161.18	23,01
3.	2012	5,223,940,074,318.61	31,79
4.	2013	5,473,787,298,623.10	4,78
5.	2014	6,252,136,312,720.01	14,22
6.	2015	5,990,424,062,511.95	(4,19)
7.	2016	6,582,780,929,675.43	9,89
8.	2017	8,195,968,131,799.16	24,51
9.	2018	9,141,371,395,099.70	11,53
10.	2019	9,280,742,072,448.24	1,52
11.	2020	9,278,520,060,061.37	(0,02)
12.	2021	9,611,977,226,695.47	3,59
13.	2022	10,235,849,833,278.70	6,49
14.	2023	9,598,903,780,312.40	(6,22)
15.	2024	10.962.497.244.934,05	14,24
16.	2025	9.837.929.951.702,67	(10,258)

5. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Tahun	Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Total Pajak Daerah Kabupaten/Kota	PDRB	Persentase (%)
1.	2010	1,360,104,831,900	176,143,095,835	194,012,970,000,000	0.7918
2.	2011	1,385,851,745,000	263,686,757,363	226,666,930,000,000	0.7277
3.	2012	1,724,326,700,000	431,731,335,861	253,265,120,000,000	0.8513
4.	2013	1,882,596,915,640	603,315,408,336	280,348,460,000,000	0.8867
5.	2014	2,267,779,726,034	930,256,331,718	306,421,600,000,000	1.0437
6.	2015	2,324,865,133,162	937,831,527,528	331,765,700,000,000	0.9834
7.	2016	2,378,960,064,733	983,822,031,664	353,866,960,000,000	0.9503

8.	2017	2,835,440,186,800	1,163,228,418,864	382,885,700,000,000	1.0444
9.	2018	3,197,900,645,678	1,281,661,833,682	419,392,160,000,000	1.0681
10.	2019	3,145,558,634,339	1,576,847,392,186	453,402,710,000,000	1.0415
11.	2020	3,081,800,984,700	1,531,554,325,933	454,607,400,000,000	1.0148
12.	2021	3,523,785,342,246	1,575,793,148,298	493,636,850,000,000	1.0331
13.	2022	3,680,900,000,000	2,192,431,962,105	591,603,480,000,000	0.9928
14.	2023	4,149,362,000,000	2,378,564,769,290	629,099,660,000,000	1.0377
15.	2024	4,301,394,172,077	2,477,881,311,653	663,961,700,000,000	1.0210
16.	2025	3.927.846.336.223,83	2.631.521.628.353,91	6.559.367.964.577,74	0,909

6. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Tahun	Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,369,936,000,000.00	42.51
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,849,119,912,016.18	46.65
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,001,714,583,551.61	38.32
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,027,037,384,205.10	37.03
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,422,673,788,968.36	38.75
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,534,526,413,315.20	42.31
7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,546,177,544,347.76	38.68
8.	2017	8,195,968,131,799.16	3,031,633,624,303.15	36.99
9.	2018	9,141,371,395,099.70	3,528,010,712,183.45	38.59
10.	2019	9,280,742,072,448.24	3,494,510,853,251.24	37.65
11.	2020	9,278,520,060,061.37	3,375,100,984,841.37	36.38
12.	2021	9,611,977,226,695.47	3,866,149,015,117.47	40.22
13.	2022	10,235,849,833,278.70	4,931,014,199,344.74	48.17
14.	2023	9,598,903,780,312.40	5,199,971,996,791.40	54.17
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,312,800,889,308.00	48.45
16.	2025	9.837.929.951.702,67	4.509.197.075.145,67	45,84

7. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Tahun	Target [Rp]	Realisasi [Rp]	Persentase (%)
1.	2013	2.214.420.245.000,00	2.027.037.384.205,10	91,54
2.	2014	2.595.724.088.303,00	2.422.673.788.968,36	93,33
3.	2015	2.871.976.896.280,09	2.534.526.413.315,20	88,25
4.	2016	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.347,76	82,30
5.	2017	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,15	95,78
6.	2018	3.449.590.628.837,00	3.528.010.712.183,45	102,27
7.	2019	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,24	101,68
8.	2020	3.617.058.256.621,75	3.375.100.984.841,37	93,31

9.	2021	4.747.088.053.456,97	3.866.149.015.117,47	81,44
10.	2022	5.385.438.862.341,00	4.931.014.199.344,74	91,56
11.	2023	5.537.632.151.975,00	5.199.971.996.791,40	93,90
12.	2024	5.236.576.566.867,00	5.312.800.889.308,00	101,45
13.	2025	4.838.287.154.591,00	4.509.197.075.145,67	93,20

8. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	PDRB ADHB Non Migas [Rp]	Persentase (%)
1.	2010	1.369.936.000.000,00	194.012.970.000.000,00	0,70
2.	2011	1.849.119.912.016,18	226.666.930.000.000,00	0,82
3.	2012	2.001.714.583.551,61	253.265.120.000.000,00	0,79
4.	2013	2.027.037.384.205,10	280.348.460.000.000,00	0,72
5.	2014	2.422.673.788.968,36	306.421.600.000.000,00	0,79
6.	2015	2.534.526.413.315,20	331.765.700.000.000,00	0,76
7.	2016	2.546.177.544.347,76	353.866.960.000.000,00	0,72
8.	2017	3.031.633.624.303,15	336.219.400.000.000,00	0,90
9.	2018	3.528.010.712.183,45	367.862.100.000.000,00	0,96
10.	2019	3.494.510.853.251,24	397.889.000.000.000,00	0,88
11.	2020	3.375.100.484.841,37	406.862.100.000.000,00	0,83
12.	2021	3.866.149.015.117,47	435.838.000.000.000,00	0,89
13.	2022	4.931.014.199.344,74	521.236.150.000.000,00	0,95
14.	2023	5.197.288.200.424,89	569.675.270.000.000,00	0,91
15.	2024	5.312.794.988.178,45	663.961.720.000.000,00	0,80
16.	2025	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,68

9. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	Tahun	Realisasi PAD [Rp]	PDRB ADHB PKPD [Rp]	Rasio
1.	2010	1.369.936.000.000,00	876.092.777.777,78	1,56
2.	2011	1.849.119.912.016,18	1.027.828.888.888,89	1,80
3.	2012	2.001.714.583.551,61	1.135.833.888.888,89	1,76
4.	2013	2.027.037.384.205,10	1.252.367.222.222,22	1,62
5.	2014	2.422.673.788.968,36	1.358.042.777.777,78	1,78
6.	2015	2.534.526.413.315,20	1.438.316.666.666,67	1,76

7.	2016	2.546.177.544.347,76	1.461.885.555.555,56	1,74
8.	2017	3.031.633.624.303,15	1.661.254.444.444,44	1,82
9.	2018	3.528.010.712.183,45	1.803.348.333.333,33	1,96
10.	2019	3.494.510.853.251,24	2.038.159.444.444,44	1,71
11.	2020	3.375.100.484.841,37	1.777.500.000.000,00	1,90
12.	2021	3.866.149.015.117,47	1.891.977.777.777,78	2,04
13.	2022	4.931.014.199.344,74	1.897.995.555.555,56	2,60
14.	2023	5.197.288.200.424,89	2.074.106.111.111,11	2,51
15.	2024	5.312.794.988.178,45	2.276.276.111.111,11	2,33
16.	2025	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,17

- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan
- Pembahasan laporan kinerja telah diagendakan setiap triwulan tahun berkenaan (dokumen terlampir)

III. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP akan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

Palembang, 21 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. **MAD RIZWAN, S.STP., M.M**
KABINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001